

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara adalah organisasi publik terbesar. Suatu negara pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tujuan setiap negara pasti berbeda-beda termasuk negara Indonesia. Tujuan negara terbentuk berdasarkan perhitungan tempat, keadaan, waktu serta sifat dari kekuasaan. Maka dari itu, tujuan suatu negara secara umum adalah membentuk dan memelihara hak, kemerdekaan serta kesejahteraan bagi warganya. Untuk memperoleh hal tersebut maka perlu disusun sebuah konstitusi yang berisi aturan dan prinsip dasar politik bagi sebuah negara. Di Indonesia konstitusi itu tertuang dalam bentuk Undang-Undang. Undang-Undang ini bersifat mengatur, mengikat dan wajib bagi seluruh warga negara..

Tujuan sebuah negara tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh sistem administrasi negara yang baik dan terstruktur. Salah satu bidang administrasi yang harus dikembangkan adalah administrasi kependudukan. Di Indonesia Administrasi Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan beberapa hal pentingnya adalah mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dan Kartu Identitas Penduduk (KTP) . Dalam rangka mendukung terlaksananya UU No 24 Tahun 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berperan penting dalam penerapan SIAK. Dinas Pencatatan Sipil dan Administrai Kependudukan mengintegrasikan SIAK dengan Kecamatan, dan Kelurahan/Desa setempat. Dengan penggunaan SIAK ini, pengelolaan administrasi kependudukan yang berada ditingkat kecamatan akan langsung terhubung dengan dinas. Data yang tersimpan secara digital akan terupdate secara online ketika terjadi peubahan data kependudukan. Pada masa transisi dari KTP biasa menuju KTP elektronik (e-KTP), SIAK digunakan dalam aplikasi e-KTP. Sumber data yang digunakan dalam perekaman e-KTP berasal dari database SIAK. *Entry* data baru juga masih menggunakan aplikasi SIAK untuk kemudian dilakukan perekaman melalui aplikasi e-KTP pada perangkat komputer yang berbeda.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di kota

Cimahi, melalui Perda Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi, pemerintah telah

menerapkan SIAK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.

Salah satu program yang menggunakan SIAK ini adalah pemutakhiran data. Dalam pemutakhiran data ini lah semua masyarakat di panggil untuk memeriksa data mereka yang dikira bermasalah. Namun menurut pak Dani Kurniawan selaku staf ASN bidang kependudukan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, Dalam penerapan SIAK di Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi dihadapkan dengan beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Banyaknya masyarakat yang memiliki NIK ganda. Yang mana seharusnya setiap warga Negara hanya boleh memiliki satu NIK karena salah satu sifat dari NIK yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa NIK tersebut bersifat tunggal.
2. Sering terjadinya jaringan error pada SIAK sehingga data masyarakat yang bermasalah di Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan harus disimpan sampai jaringan kembali baik yang mengakibatkan masyarakat harus datang kembali ke untuk mengetahui hasil dari pemrosesan data tersebut. Yang mana kebanyakan masyarakat malas untuk kembali memeriksa data mereka yang mengakibatkan menumpuknya data masyarakat di Dinas tersebut.
3. Banyak masyarakat yang dipanggil ulang dalam proses pemutakhiran data bahkan “pada saat ini pemutakhiran data dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan meningkat yang mana tahun 2018 hanya

sebanyak 1500 sekarang pemutakhiran data penduduk kota cimahi mencapai 2500 penduduk.” Ungkap pak dani yang merupakan salah satu staf utama yang menangani masalah pemutakhiran data.

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi kebijakan Sistem Informas Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi tahun 2019”**

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan Kota Cimahi. Khususnya pada permasalahan NIK ganda.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi ?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka maksud dan tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

- 1) Mengetahui Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi.
- 2) Mengetahui faktor penghambat implementasi sstem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi.
- 3) Mengetahui faktor pendukung implementasi sstem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi.

E. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat dan kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan banyak memberikan manfaat dan kegunaan, baik bagi penulis, peneliti lain, Lembaga penelitian, ataupun masyarakat.

- a) Bagi penulis, semoga dapat menambah wawasan penulis, umumnya mengenai administrasi kependudukan dan khususnya penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan kota cimahi
- b) Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini akan menjadi salah satu sumber penelitian atau pembanding ketika memiliki pembahasan yang sama.
- c) Bagi khalayak umum, penelitian ini dapat menjelaskan implementasi sstem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada dinas penatatan sipil dan administrasi kependudukan kota cimahi.

2. Manfaat dan Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada dinas pencatatan sipil dan administrasi kependudukan kota cimahi. Sehingga dapat membantu aparatur pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi terkait identitas kependudukan, khususnya pada pemerintah kota cimahi.

F. Kerangka Berfikir

Suatu negara pasti mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap negara pasti terdapat masalah kemasyarakatan yang terjadi. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang harus diimplementasikan pada masyarakat dan pada pemerintah itu sendiri.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Wahab, 2006:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat untuk kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam buku implementasi dalam birokrasi pembangunan, Setiawan (2004:39) menyebutkan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang efektif.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau

seperangkat aktivitas baru dengan harapan oranglain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang biosa dipercaya.

Usman dalam konteks implementasi berbasis kurikulum berpendapat bahwa Implementasi bermula pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar suatu aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan beberapa definisi implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pelaksana dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa ada enam variabel yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen pelaksana
- e. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi
- f. Disposisi

G. Preposisi

Implementasi dari sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi mengenai identitas penduduk khususnya pada Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kota Cimahi tahun 2018 berdasarkan standar kebijakan dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan politik, sosial dan ekonomi dan disposisi.

